

**PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pengelolaan Daerah
Perlindungan Laut (DPL) dan Mata Pencaharian Alternatif Secara Berkelanjutan
di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur)**

***PRINCIPLES OF COMMUNITY DEVELOPMENT
(Case Study of Coastal Community Empowerment through Sustainable Management
of Marine Protected Areas (MPAs) and Alternative Livelihoods in Batu Nampar
Selatan Village, East Lombok Regency)***

Syarif Husni^{1*}, Hayati¹

¹Program Studi Doktor Pertanian Berkelanjutan Pascasarjana Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

*Email: syarifhusni1964@gmail.com

Abstrak

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Tujuan penelitian adalah menganalisis prinsip-prinsip pengembangan masyarakat pada program pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan mata pencaharian alternatif di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan artikel. Hasil penelitian menunjukkan Pemberdayaan nelayan dan wanita nelayan melalui pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan mata pencaharian alternatif di Desa Batu Nampar Selatan telah memenuhi prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Pemberdayaan yang sukses akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pembangunan, mampu mengidentifikasi masalah, dan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat; daerah perlindungan laut; mata pencaharian alternatif.

Abstract

The main approach in the concept of empowerment is that the community is not made the object of various development projects, but is the subject of its own development efforts. The purpose of the study was to analyze the principles of community development in community empowerment programs through the establishment of Marine Protected Areas (MPAs) and alternative livelihoods in Batu Nampar Selatan Village, East Lombok Regency. This study uses a qualitative approach with secondary data obtained through literature studies and articles. These data provide a theoretical basis that supports the analysis. The results of the study show that the empowerment of fishermen and fisherwomen through the establishment of Marine Protected Areas (MPAs) and alternative livelihoods in Batu Nampar Selatan Village has met the principles of community development. Successful empowerment will encourage the community to be more active in development, able to identify problems, and plan activities to improve welfare.

Key words: community empowerment; marine protected areas; alternative livelihoods

PENDAHULUAN

Pembangunan sering memposisikan masyarakat termasuk di pedesaan sebagai objek pembangunan bukan subjek (aktor) pembangunan. Masyarakat bahkan dipandang sebagai beban pembangunan bukan *asset* atau modal, potensi dan sumberdaya pembangunan. Hal ini karena masyarakat desa kurang memiliki dan diberikan informasi, diberikan pencerahan, dilibatkan secara utuh dan menyeluruh bukan didominasi oleh kelompok tertentu. Hal ini sebagaimana menurut hasil penelitian Kementerian Pertanian

bekerjasama dengan Bank Dunia Tahun 1994 dalam laporannya yang berjudul “Improving the Transfer and Use of Agricultural Information” mengemukakan bahwa terhambatnya pembangunan pedesaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : (1) kesadaran masyarakat pedesaan masih rendah akan perlunya komunikasi, (2) masih sulit mendapat informasi yang tepat waktu, (3) sebagian besar informasi dalam bentuk tertulis dan sulit dimengerti petani, (4) masih sulit memanfaatkan informasi secara bersama-sama, (5) petugas lapangan mempunyai akses yang terbatas terhadap informasi hasil penelitian, (6) kurangnya penguasaan terhadap pelayanan komunikasi yang baik ke daerah pedesaan (Handoko, 2013).

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian “pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development) Chamber tahun 1995” (Kartasasmita, 1996). Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri.

Community Development (Pengembangan Masyarakat) adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana produksi. Mereka umumnya terdiri atas buruh tani, petani penggarap, petani berlahan kecil, para nelayan, masyarakat hutan, kalangan pengangguran, orang cacat dan orang-orang yang dibuat marginal karena umur, keadaan gender, ras dan etnis (Zubaedi, 2013). Lebih lanjut Zubaedi (2013) menyatakan salah satu tujuan dari community development (pengembangan masyarakat) adalah membangun sebuah struktur masyarakat yang didalamnya memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokratis ketika terjadi pengambilan keputusan. Masyarakat mempunyai akses kepada sumber daya, mampu mengontrol sumber daya dan struktur kekuasaan di masyarakat.

Dari sisi sosial masyarakat pesisir pada umumnya tergolong masyarakat miskin. Begitu pula halnya masyarakat yang hidup sekitar Teluk Ekas Lombok Timur, kondisi sosial ekonomi juga memprihatinkan dan mereka tergolong nelayan kecil. Tantangan lainnya keterbatasan lapangan kerja selain nelayan dan walaupun ada peluang kerja, namun harus memiliki modal yang cukup. Oleh karena itu masyarakat terutama kaum laki-laki banyak yang bekerja ke luar negeri terutama ke Malaysia. Selanjutnya tantangan sosial lainnya adalah tingkat pendidikan yang rendah yaitu persentase Tamat SD yang lebih tinggi (Husni & Abubakar, 2021).

Desa Batu Nampar Selatan merupakan salah satu desa yang terletak di pesisir bagian barat teluk Ekas. Transportasi menuju desa ini sangat lancar dengan jarak dengan ibukota provinsi adalah 60 km, jarak dengan ibukota kabupaten 50 km dan jarak dengan ibukota kecamatan adalah 25 km. Sarana penerangan listrik sudah masuk ke lokasi namun sarana air bersih masih sulit. Untuk mendapatkan air masyarakat harus membeli seharga Rp. 1.000,- /ember. Jumlah penduduk Dusun Batu Nampar Selatan sebanyak 1350 jiwa (280 KK) yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan kecil, petani rumput laut dan pedagang hasil produksi pertanian/sarana keperluan nelayan dan sebagian kecil bekerja di sektor jasa dan pegawai swasta/negeri. Aktivitas penangkapan hanya terbatas di sekitar perairan teluk, karena menggunakan sampan ukuran kecil dengan penggerak motor tempel. Alat tangkap yang digunakan adalah berbagai jenis jaring dan pancing yang masih sederhana. Sebagian nelayan mempunyai bagan tancap/apung yang digunakan untuk penangkapan

ikan pada malam hari dengan memanfaatkan lampu petromak. Hasil tangkapan nelayan cukup beragam, baik jenis maupun ukuran.

Tantangan politik terkait dengan kebijakan pemerintah yang kurang memihak kepada masyarakat nelayan seperti kebijakan terkait bantuan modal yang minim, sehingga masyarakat pesisir sangat tergantung pada lembaga keuangan non formal (tengkulak) dan bank rontok (istilah masyarakat setempat pada lembaga keuangan) yang memberlakukan tingkat bunga pinjaman yang tidak wajar (tinggi). Tujuan penelitian adalah menganalisis prinsip-prinsip pengembangan masyarakat pada program pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan mata pencaharian alternatif di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian dengan menelusuri data sekunder yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya, bukan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Metode ini sering digunakan sebagai metode pendukung atau sebagai fokus utama dalam penelitian, terutama saat data primer sulit atau tidak tersedia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan artikel. Data ini memberikan dasar teoritis yang mendukung analisis (Idhayani et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat

Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Batu Nampar Selatan melalui pengelolaan DPL dan mata pencaharian alternatif. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memberdayakan mereka untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 26 prinsip-prinsip pengembangan masyarakat di daerah penelitian, yaitu:

Kesetaraan dan Keadilan Gender

Prinsip kesetaraan menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau kelompok tertentu. Gender adalah konsep yang mencakup peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tertentu (Hartati et al., 2024). Gender sering dipahami sebagai konstruksi sosial yang berbeda dari seks biologis seseorang, yang ditentukan oleh karakteristik fisik dan genetika. Pemahaman yang mendalam tentang gender adalah kunci untuk mencapai kesetaraan, inklusi, dan pemberdayaan dalam masyarakat. Dalam program pemberdayaan, kesetaraan bertujuan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan manfaat dari program tersebut. Penerapan kesetaraan dapat melibatkan penanganan isu-isu diskriminasi, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial, serta menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua.

Pada program pemberdayaan masyarakat pesisir yang telah dilakukan di Desa Batu Nampar Selatan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan gender berupa sasaran program pemberdayaan adalah rumah tangga nelayan kecil (rumah tangga nelayan yang memiliki

armada tangkap yang sederhana seperti perahu dan sampan baik yang bermesin atau tidak bermesin dan rumah tangga nelayan buruh) dan pada saat rapat sosialisasi, workshop pesertanya tidak hanya dari kaum laki-laki tetapi juga kaum perempuan minimal 30% dari jumlah peserta serta. program pemberdayaan masyarakat tidak hanya bertujuan untuk peningkatan pendapatan kaum laki-laki seperti budidaya rumput laut, tetapi juga menyasar kaum perempuan seperti kegiatan pengolahan hasil rumput laut dan perikanan.

Partisipasi

Partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap saling berhubungan di antara stakeholders yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain. Secara sederhana, “partisipasi” dapat dimaknai sebagai *“the act of taking part or sharing in something”* (Syahyuti, 2006). Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig dan May, 1995 dalam Hikmat, 2004). Lebih lanjut (Hikmat, 2013) menjelaskan pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Partisipasi menurut Hoofsteede (1971) yang dikutip oleh (Khairuddin, 1992) berarti *“The taking part in one or more phases of the process”* atau mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses, dalam hal ini proses pembangunan.

Berbagai hasil penelitian melaporkan bahwa banyak program pembangunan perdesaan di masa lalu dinilai tidak berhasil karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat, sementara keterlibatan masyarakat hanya dalam tataran wacana dan dalam implementasi hanya menjadi sekedar pelengkap proses pembangunan. Akibat dari mekanisme pembangunan yang kurang aspiratif dan tidak partisipatif, membuat proses dan hasil menjadi parsial dan tidak berkelanjutan. Sebagian besar kegiatan pembangunan merupakan program dari atas (*top down*), sangat berorientasi proyek, dan menonjolkan ego sektoral.

Prinsip partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pemberdayaan. Partisipasi dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan. Dalam praktik, partisipasi dapat diwujudkan melalui konsultasi, diskusi, rapat, kegiatan bersama, dan berbagai bentuk keterlibatan aktif lainnya. Sosialisasi DPL melalui pertemuan desa yang memberikan informasi pada masyarakat agar tau jika sebagian dari luas laut itu akan dikonservasi. Begitu pula pertemuan informal dengan masyarakat desa di luar desa program seperti Desa Semoyang, Desa Bile Lando Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan pertemuan tersebut adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat nelayan bahwa di Desa Batu Nampar Selatan akan ada Daerah Perlindungan laut (DPL) beserta aturan pengelolaannya (*awiq-awiq*). Selain itu sosialisasi juga menggunakan media cetak seperti leaflet, baliho dan koran

Keswadayaan (Kemandirian)

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus memprioritaskan sumber daya dan keterampilan masyarakat daripada bantuan dari pihak lain, dalam hal ini orang miskin tidak dipandang sebagai objek yang tidak mampu, namun sebaliknya. Program yang telah

dilaksanakan oleh pihak yayasan sejauh ini belum mampu menerapkan prinsip tersebut secara ideal (Yemima & Hamid, 2023). Prinsip keswadayaan (kemandirian) menekankan pentingnya mendorong masyarakat untuk mampu mengelola diri sendiri dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dalam program pemberdayaan, keswadayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Penerapan keswadayaan dapat melibatkan pengembangan kapasitas, pelatihan, penyediaan akses informasi, dan dukungan yang memungkinkan masyarakat untuk menjadi mandiri. Salah satu contoh dari keswadayaan adalah kegiatan pengurusan Ijin Pangan Industri Rumah tangga (P-IRT). Ijin P-IRT memiliki peran yang sangat strategis terutama dalam keamanan pangan dan jaringan pemasaran produk olahan mengingat dua faktor tersebut akan terkait dengan minat konsumen terhadap produk olahan pangan yang bersangkutan.

Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya program pemberdayaan yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat. Keberlanjutan dapat tercapai melalui perencanaan yang matang, penguatan kapasitas lokal, penguatan organisasi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dalam program pemberdayaan, keberlanjutan bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dan tidak menyebabkan ketergantungan terhadap pihak luar. Penerapan prinsip keberlanjutan seperti pelatihan survei terumbu karang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat nelayan dalam hal kondisi terumbu karang yang bagus sampai yang rusak, sehingga menjadi pedoman dalam monitoring dan evaluasi DPL.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa keberadaan strategi pemasaran menjadi salah satu kunci kesuksesan sebuah usaha. Bahkan saat ini tidak hanya perusahaan besar saja yang membutuhkan cara-cara jitu untuk memasarkan produk maupun jasa mereka. Para pelaku usaha kecil dan menengah pun membutuhkan dukungan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produknya dan memperluas jangkauan pasar yang dimilikinya. Hal ini penting agar produk atau jasa yang ditawarkan para pelaku UKM bisa dikenal masyarakat luas, dan bisnisnya bisa berkembang pesat.

Kebutuhan Dasar

Prinsip ini menekankan bahwa pengembangan masyarakat harus fokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Prinsip pengembangan masyarakat yang menyangkut kebutuhan dasar dalam kegiatan pemberdayaan nelayan ini merupakan hal yang esensial karena menyangkut kebutuhan hidup, karena nelayan sebagian besar pendapatannya berasal dari hasil tangkapan ikan. Jika status Daerah Perlindungan Laut (DPL) sudah berjalan dengan baik dalam arti pelanggaran seperti *illegal fishing* dikurangi atau ditiadakan, maka akan berdampak terhadap meningkatnya hasil tangkapan nelayan sekaligus pendapatan nelayan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum adanya DPL. Kondisi ini akan memberikan pengaruh bagi rumah tangga nelayan untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang dan papan.

Kemajuan Lokal

Tujuan kemajuan lokal adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, peningkatan sosial masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, pelestarian alam dan budaya. Perbaikan kondisi sosial dan ekonomi dari program pemberdayaan mampu memberikan peningkatan pendapatan nelayan. Tidak saja dari sisi ekonomi tetapi juga dari sisi sosial yakni adanya kesempatan kerja yang luas seperti budidaya rumput laut dan usaha agroindustri, sehingga kemajuan Desa Batu Nampar Selatan akan tercapai dan diwujudkan.

Perubahan Sikap

Prinsip pengembangan masyarakat yang menyangkut perubahan sikap menekankan pentingnya perubahan mental dan perilaku masyarakat sebagai bagian integral dari proses pembangunan, setara dengan pencapaian kemajuan material. Perubahan sikap ini dapat meliputi peningkatan partisipasi masyarakat, kemampuan untuk berkolaborasi, serta perubahan dalam cara mereka memandang isu-isu pembangunan.

Perubahan sikap masyarakat pesisir Desa Batu Nampar Selatan dengan adanya program pemberdayaan ini ditandai dengan berkurangnya kegiatan *illegal fishing* (penggunaan bahan peledak dan potasium) dan orientasi wanita nelayan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui usaha pengolahan hasil perikanan dan rumput laut.

Pemimpin Lokal

Prinsip pengembangan masyarakat yang menyangkut pemimpin lokal meliputi identifikasi, dorongan semangat, dan pelatihan mereka sebagai bagian dari program pengembangan. Pemimpin lokal juga berperan dalam mempromosikan kepemimpinan dan kepemilikan komunitas, serta memastikan bahwa program-program pembangunan berbasis masyarakat memiliki fokus pada kebutuhan dasar masyarakat dan perubahan sikap, selain kemajuan material.

Proses pemberdayaan masyarakat di Desa Batu Nampar Selatan telah melahirkan pemimpin-pemimpin lokal yang handal baik di bidang usaha budidaya rumput laut, pengolahan hasil perikanan maupun dalam pengelolaan DPL.

Kepercayaan

Prinsip pengembangan masyarakat yang menyangkut kepercayaan (trust) melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mengakui nilai dan pengetahuan tradisional, serta percaya pada kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Ini juga mencakup kepercayaan terhadap kelompok tertentu seperti perempuan dan kaum muda untuk memperkuat program pembangunan. Kepercayaan diri masyarakat merupakan kunci keberhasilan pengembangan, sehingga perlu diperkuat melalui partisipasi aktif mereka dalam setiap proses.

Program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Batu Nampar Selatan memiliki harapan yang besar bagi munculnya tokoh wanita nelayan sebagai seorang wirausaha termasuk bagi kaum muda yang ada di desa tersebut untuk melanjutkan estafet dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.

Dukungan intensif dan ekstensif dari pemerintah

Dukungan pemerintah yang intensif dan ekstensif dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

mereka. Dukungan ini dapat berupa bantuan modal, pelatihan, pengembangan infrastruktur, serta akses terhadap pasar dan teknologi yang tepat guna terutama pasca program pemberdayaan. Dukungan ini diharapkan ada setelah program pemberdayaan selesai.

Pengadopsian kebijakan yang konsisten

Pengaturan administratif yang spesifik, perekrutan dan pelatihan personil, mobilisasi sumberdaya lokal dan nasional, dan organisasi penelitian, eksperimen, dan evaluasi. Prinsip pengembangan masyarakat mencakup pengadopsian kebijakan yang konsisten, karena hal ini penting untuk mencapai keberhasilan program-program pengembangan masyarakat dalam skala nasional. Kebijakan yang konsisten akan memastikan bahwa program-program tersebut berjalan secara efektif dan terarah, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pada program pemberdayaan masyarakat di Desa Batu Nampar Selatan merupakan satu kesatuan yang terpisah dari proposal yang menjadi panduan pada tahap-tahap kegiatan pemberdayaan.

Sumberdaya dalam bentuk organisasi-organisasi non-pemerintah

Program pemberdayaan masyarakat di Desa Batu Nampar Selatan difasilitasi oleh LSM yaitu Yayasan Laut Biru (YLB). Kiprah LSM ini memang terfokus pada kegiatan yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir baik itu menyangkut penelitian dan pemberdayaan masyarakat.

Kemajuan ekonomi dan sosial pada tingkat lokal mensyaratkan pembangunan yang paralel di tingkat nasional.

Pemberdayaan masyarakat di Desa Batu Nampar Selatan merupakan salah satu kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Program Pemerintah Daerah Provinsi NTB. Pembentukan DPL merupakan bagian dari pembentukan kawasan konservasi perairan di Indonesia. Begitu pula budidaya rumput laut juga merupakan salah satu program PIJAR (sapi, jagung dan rumput laut).

Menghargai Pengetahuan Lokal (*Valuing Local Knowledge*)

Prinsip pengembangan masyarakat yang menghargai pengetahuan lokal berarti menghormati dan memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada di masyarakat setempat dalam proses pembangunan. Dengan demikian mengakui, menghargai, dan mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Pengetahuan lokal sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologis, seperti proses penangkapan ikan yang diatur di dalam awiq-awiq. Nelayan tidak diperbolehkan menggunakan ukuran diameter jaring kurang dari 2 cm, karena akan menangkap ikan-ikan kecil yang belum waktunya untuk ditangkap. Begitu pula penggunaan bahan peledak tidak hanya berdampak pada hasil tangkapan nelayan yang banyak, tetapi kerusakan terumbu karang yang akan mengganggu fungsi ekologis di wilayah pesisir.

Penerapan prinsip Mengatasi Wacana yang Merugikan (*Addressing discourses of disadvantage*).

Prinsip ini telah diterapkan dengan adanya upaya mengubah wacana bahwa perempuan tidak dapat berpartisipasi dalam rapat pertemuan desa, menjadi wacana bahwa perempuan

mampu berperan aktif dalam keluarga dan masyarakat terutama yang menyangkut diversifikasi pekerjaan seperti menjadi wirausaha agroindustri perikanan dan rumput laut

Penerapan prinsip Pemberdayaan (*Empowerment*)

Prinsip pengembangan masyarakat yang menyangkut pemberdayaan, kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan, bertujuan untuk memberikan masyarakat kemampuan untuk menentukan masa depan mereka, berpartisipasi dalam perubahan sosial dan politik, serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan juga melibatkan pengakuan akan potensi dan kearifan lokal, serta dukungan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program

Secara jelas dapat dilihat pada program pengelolaan daerah perlindungan laut (DPL) yang berbasis masyarakat, penyusunan awiq-awiq, pembentukan kelompok pengawas laut (Badan Pengelola Perikanan Laut Desa/BP2LD), fasilitasi budidaya rumput laut dan agroindustri dari perikanan dan rumput laut, studi banding dan fasilitasi pemasaran hasil agroindustri.

Penerapan prinsip Menghargai Kebudayaan Lokal (*Valuing local culture*)

Prinsip pengembangan masyarakat yang menghargai kebudayaan lokal (*valuing local culture*) sangat penting karena kebudayaan lokal merupakan bagian integral dari identitas dan keberlanjutan suatu masyarakat. Menghargai kebudayaan lokal berarti mengakui dan menghormati nilai-nilai, tradisi, pengetahuan, dan praktik budaya yang telah ada dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penyusunan aturan lokal (*awiq-awiq*) sebagai bagian dari pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di desa Batu Nampar Selatan.

Penerapan prinsip Menghargai Sumber Daya Lokal (*Valuing local resources*)

Prinsip pengembangan masyarakat yang menghargai sumber daya lokal (*local resources*) sangat penting karena mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada di sekitar mereka. Ini berarti tidak hanya fokus pada sumber daya alam, tetapi juga pengetahuan lokal, kebudayaan, keterampilan, dan kekuatan sosial masyarakat itu sendiri.

Diwujudkan dengan pembentukan DPL melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki, seperti pemberlakuan aturan lokal oleh desa setempat sebagai dasar dalam mengontrol pengelolaan sumberdaya. Selain itu kondisi perairan yang bersih dan tenang memberikan kemudahan bagi nelayan dalam usaha budidaya rumput laut.

Penerapan prinsip Menghargai Proses Lokal (*Valuing local processes*)

Penerapan prinsip menghargai proses lokal (*valuing local processes*) dalam pengembangan masyarakat menyangkut pengakuan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, sumber daya, serta budaya lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan. Prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program serta menghormati keunikan dan keragaman budaya lokal.

Penerapannya yaitu terpeliharanya proses-proses lokal seperti musyawarah dan gotong royong, dan mengoptimalkan proses-proses lokal tersebut dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan DPL dan mata pencaharian alternatif. Proses pemberdayaan masyarakat juga berjalan dengan partisipasi dan kehendak yang muncul dari dalam masyarakat sendiri, tanpa ada pemaksaan dari pihak luar.

Penerapan Prinsip Kerjasama dan Konsensus (*Cooperation and consensus*)

Penerapan prinsip kerjasama dan konsensus melibatkan Upaya bersama untuk mencapai tujuan dengan mendengarkan semua pihak dan mencari solusi yang dapat diterima secara luas. Ini melibatkan diskusi terbuka, kompromi, dan saling pengertian, memastikan tidak ada yang merasa dikucilkan atau bahwa keputusannya tidak didukung. Diwujudkan dengan budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan terutama pada hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakat yang sangat vital, seperti pada pembagian kelompok budidaya rumput laut dan penentuan Lokasi DPL.

Perspektif ekologis dan pendekatan tanpa kekerasan menekankan perlunya struktur yang koperatif. Community development kemudian harus menentang dominasi etika persaingan, dan membuktikan bahwa itu telah didasarkan pada asumsi yang salah. Karena itu, community development harus bertujuan mendirikan struktur dan proses alternatif, yang memiliki dasar pemikiran Konsensus dalam pengambilan keputusan merupakan satu di antaranya (Yunandar et al., 2019)

Membangun Komunitas (*Community Building*)

Prinsip utama dalam pengembangan masyarakat yang berkaitan dengan membangun komunitas (*community building*) adalah melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, termasuk memberikan suara kepada masyarakat dalam menentukan kebutuhan dan solusi, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Penerapannya pada setiap seperti jumlah anggota kelompok budidaya rumput laut yang diinginkan maksimal 2 orang per kelompok.

Pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat, harus disadari bahwa mereka memiliki karakteristik budaya, geografi, sosial, politik, dan demografi yang unik, sehingga pengalaman pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat belum tentu dapat berjalan di masyarakat yang lain bahkan sangat beresiko mengalami kegagalan dan melemahkan pengalaman orang-orang dari masyarakat tersebut karena hal itu bukan proses yang cocok untuk mereka (Ife & Tesoriero, 2008). Peningkatan kapasitas kelembagaan berarti usaha meningkatkan peran dan mengembangkan tata kelembagaan di tingkat masyarakat sehingga mampu mewadahi setiap gagasan, usulan dan aspirasi dari masyarakat untuk kemajuan dalam komunitasnya. Outcome dari usaha ini adalah terbentuknya lembaga-lembaga berbasis komunitas untuk pembangunan dalam lingkungannya (Dwiyanto & Jemadi, 2013).

Keinklusifan (*Inclusiveness*)

Prinsip pengembangan masyarakat yang bersifat inklusif adalah prinsip yang memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati manfaat dari pembangunan, tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan berdasarkan latar belakang, identitas, atau kondisi mereka. Dengan menerapkan prinsip inklusif, pembangunan masyarakat dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi semua anggota masyarakat, serta menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan Sejahtera (Nababan et al., 2014).

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan DPL seperti penentuan luas kawasan konservasi berdasarkan luas terumbu karang, dan Lokasi DPL tidak jauh dari tempat pemukiman untuk memudahkan pengawasan.

Damai dan Tanpa Kekerasan (*Peace and Violence*)

Prinsip pengembangan masyarakat yang bersifat damai dan tanpa kekerasan menekankan pada pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, serta menghormati hak asasi manusia dan keadilan sosial. Pengembangan masyarakat yang bersifat damai juga mendorong penyelesaian konflik melalui dialog dan negosiasi, serta menghindari penggunaan kekerasan dalam segala bentuk (Riyadi, 2016).

Proses pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Batu Nampar Selatan dilaksanakan melalui proses partisipatif (*bottom up*) mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan atas dasar proses musyawarah mufakat pada saat pengambilan keputusan, seperti penentuan lokasi DPL, mengingat ada beberapa anggota masyarakat yang tidak menyetujui tempat DPL, karena beralasan jauh dari pengawasan. Akhirnya diputuskan untuk memilih “Takat Sapak Perendang” sebagai lokasi DPL yang paling dekat dengan pemukiman dengan tujuan agar memudahkan pengawasan.

Kecepatan Pembangunan (*The Pace of Development*)

Prinsip pengembangan masyarakat tidak bersifat kecepatan pembangunan, melainkan menekankan pada pembangunan yang berkelanjutan, pemberdayaan, inklusivitas, keadilan sosial, hak asasi manusia, demokrasi partisipatif, dan kesetaraan. Pembangunan masyarakat yang berkelanjutan berarti upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Safitri, 2019).

Pemberdayaan masyarakat memerlukan waktu yang cukup lama karena menyangkut “perubahan perilaku”. Proses seperti ini memerlukan dukungan dari semua komponen, karena menyatukan persepsi, sehingga perlu waktu yang cukup untuk mencapai kondisi yang ideal. Kasus pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Batu Nampar Selatan misalnya tahap-tahap kegiatan perlu menyesuaikan dengan waktu luang masyarakat, mengingat kebanyakan dari mereka adalah sebagai nelayan.

Keterkaitan Global dan Lokal (*Linking The Global and The Local*)

Prinsip keterkaitan global dan lokal (*global and local linkage*) dalam pengembangan masyarakat adalah pendekatan yang mengintegrasikan isu-isu global dengan konteks lokal, mengakui bahwa masalah dan solusi dapat terjadi di berbagai skala. Pendekatan ini penting untuk keberlanjutan dan efektivitas program pengembangan, karena dapat membantu masyarakat untuk memahami dampak global dan berkontribusi pada solusi global (Agustana, 2020)

Konservasi sumberdaya alam merupakan isu global, karena terjadi kerusakan sumberdaya khususnya ekosistem sumberdaya pesisir dan laut, sehingga mengancam kelestarian dan berkurangnya habitat perikanan. Oleh karena itu perlu ada sebagian wilayah laut untuk dilindungi dari eksploitasi sumber daya perikanan, maka diperlukan adanya DPL.

Anti Praktek Kolonialisme (*Anti-colonialist Practice*)

Prinsip pengembangan masyarakat yang bersifat anti-kolonialisme menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal, pembebasan dari pengaruh dan dominasi eksternal, serta penolakan terhadap praktik-praktik yang menguntungkan pihak luar namun merugikan masyarakat lokal. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri arah pembangunan mereka, mengutamakan kepentingan lokal. Gerakan sosial yang ditandai dengan kondisi yang penuh kegelisahan karena perasaan ketidakpuasan terhadap

kehidupan sehari-hari akibat diskriminasi dan penindasan kolonialisme (Rachman, 2018).

Prinsip ini menekankan agar masyarakat pesisir di Desa Batu Nampar Selatan diberi peluang untuk menjalankan kegiatan konservasi sumberdaya perairan yakni pembentukan DPL berdasarkan budaya lokal yang sudah lama diterapkan seperti awiq-awiq. Kemudian pada pemilihan mata pencaharian alternatif disesuaikan dengan kondisi perairan dan potensi hasil tangkapan nelayan seperti budidaya rumput laut dan pengolahan hasil perikanan dan rumput laut. Pihak eksternal hanya berfungsi sebagai fasilitator dalam setiap tahap kegiatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemberdayaan nelayan dan wanita nelayan melalui pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan mata pencaharian alternatif di Desa Batu Nampar Selatan telah memenuhi prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Pemberdayaan yang sukses akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam pembangunan, mampu mengidentifikasi masalah, dan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Saran

Denyut perubahan itu tidak berhenti setelah program selesai. Pemberdayaan yang benar-benar hidup memerlukan ruang untuk tumbuh, bukan hanya sekali disentuh lalu dilepas. Pendampingan yang berkelanjutan akan membuat DPL bukan sekadar zona di peta, tetapi menjadi kebiasaan kolektif untuk menjaga laut dan mencipta mata pencaharian yang lestari. Dengan cara itu, masyarakat tidak hanya mandiri pada hari ini, mereka membangun kebijaksanaan untuk esok.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustana, P. (2020). Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi Dalam Pembangunan Sosial. *Locus*, 12(1), 60–69. <https://doi.org/10.37637/locus.v12i1.288>
- Dwiyanto, B. S., & Jemadi, J. (2013). Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.87>
- Handoko, W. (2013). Strategi Pengembangan Masyarakat (Community Development) Melalui Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan (JIPP)*, 1, 245–260.
- Hartati, J., Asnar, A., Herliah, E., Jamil, J., Marwiah, M., & Novita, N. (2024). Analisis Kesetaraan Gender dalam Implementasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROBEBAYA) di Kantor Walikota Samarinda. *SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(3), 67–81. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i3.300>
- Hikmat, Harry. (2013). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora.

- Husni, S., & Abubakar, A. (2021). Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan dalam Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) Sapak Perendang di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v4i1.609>
- Idhayani, N., Nurlina, N., Risnajayanti, R., Salma, S., Halima, H., & Bahera, B. (2023). Inovasi Pembelajaran Anak Usia Dini : Pendekatan Kearifan Lokal Dalam Praktik Manajemen. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6), 7453–7463. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.5624>
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES.
- Khairuddin. (1992). *Pembangunan Masyarakat : Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Liberty.
- Nababan, Y. J., Syaukat, Y., Juanda, B., & Sutomo, S. (2014). Tantangan Bagi Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur: Menuju Inclusive Green Economy. *Masyarakat Indonesia*, 40(2), 211–228.
- Rachman, Y. (2018). Gerakan Anti-Kolonialisme Menuju Indonesia Merdeka Dalam Perspektif Smelserian. *SIMULACRA: JURNAL SOSIOLOGI*, 1(2). <https://doi.org/10.21107/sml.v1i2.4994>
- Riyadi, H. (2016). Koeksistensi Damai dalam Masyarakat Muslim Modernis. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(1), 18–33. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i1.575>
- Safitri, P. N. (2019). PERAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI DI REMBANG. *Islamic Communication Journal*, 4(1), 46. <https://doi.org/10.21580/icj.2019.4.1.3530>
- Syahyuti. (2006). *30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian : Penjelasan tentang Konsep, Istilah, Teori, dan Indikator serta Variabel*. Bina Rena Pariwara.
- Yemima, Y., & Hamid, I. (2023). Difabel Merajut Asa Berdaya: Pendekatan Strategis Pemberdayaan Difabel oleh Yayasan Pensil Waja Banua Kota Banjarmasin. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 31–41. <https://doi.org/10.20527/hjs.v2i1.36>
- Yunandar, D. T., Purwono, E., & Wati, S. I. (2019). Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Puton Watu Ngelak dalam Perspektif Dinamika Kelompok. *Jurnal Triton*, 10(2), 62–83.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat : Wacana dan Praktik*. Kencana.